



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kerjasama Pertahanan: Studi Kasus Kerjasama Indonesia-
Australia sebagai Upaya Indonesia dalam Mengatasi Keterbatasan
Kapabilitas Militer**

Skripsi

Oleh

Ishna Indika

2013330190

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kerjasama Pertahanan: Studi Kasus Kerjasama Indonesia-
Australia sebagai Upaya Indonesia dalam Mengatasi Keterbatasan
Kapabilitas Militer**

Skripsi

Oleh

Ishna Indika

2013330190

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

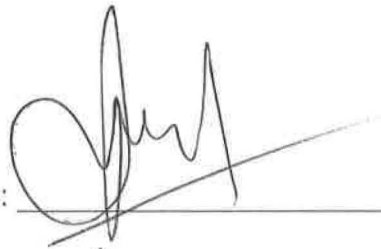


Tanda Pengesahan Skripsi

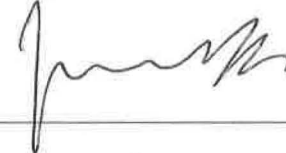
Nama : Ishna Indika
Nomor Pokok : 2013330190
Judul : Kerjasama Pertahanan: Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Australia sebagai Upaya Indonesia dalam Mengatasi Keterbatasan Kapabilitas Militer

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

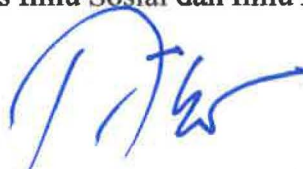
Sekretaris
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Anggota
Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ishna Indika
NPM : 2013330190
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kerjasama Pertahanan: Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Australia sebagai Upaya Indonesia dalam Mengatasi Keterbatasan Kapabilitas Militer

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Januari 2017



Ishna Indika

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penelitian ini menganalisa mengenai upaya Indonesia dalam mengatasi keterbatasan kapabilitas militer negaranya, yang dilakukan melalui kerjasama pertahanan dengan Australia. Disamping itu, penulis juga menganalisa bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia dibawah kerangka kerjasama *Agreement to Maintain Security* pada tahun 1995 dan *Lombok Treaty* yaitu pada tahun 2006.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat terjawab. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran, kritik, serta rekomendasi yang membangun dalam proses perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 10 Januari 2017

Penulis

For those who always support the author through the ups and downs

*Ayah, Mama, Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A., AKBP Oka Putra,
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si., Idil Syawfi, S.IP., M.Si., Prof. V. Bob
Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., Ph.D.*

*Mikaela Maria, M. Fakhri, Inigo Abigail, Andina Dwinta, Rizka Diandra,
Regina Rima, Isabelle F., Anna Kinanti, Michelle Stefania, Vania Supusepa,
Fadhil Hazmi, Angelia Maria, Dinda Kamil, Nabila Kasyalia, Aulia Dara,
Stephanie Ilsanker, Wynona Gabrielle, Sylvester Ariantho, Vincentius Rio,*

Petrichores,

Jatinter NCB Interpol

Friends, Lovers, or Nothing

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَجَزَاكُمُ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَا

May the Almighty recompense you with goodness..



ABSTRAK

Nama : Ishna Indika
NPM : 2013330190
Judul : Kerjasama Pertahanan: Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Australia sebagai Upaya Indonesia dalam Mengatasi Keterbatasan Kapabilitas Militer

Negara saat ini dituntut agar memiliki kemampuan pertahanan dengan militer yang kuat dan modern. Namun, biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas militer semakin mahal. Dengan melakukan kerjasama pertahanan, memungkinkan bagi suatu negara untuk melatih dan mendidik kekuatan militernya dengan kualitas yang tinggi. Begitupula dengan apa yang Indonesia lakukan untuk mengatasi segala keterbatasan kapabilitas militernya, yaitu melakukan kerjasama pertahanan dengan Australia.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang mengkaji kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia dalam kerangka *Agreement to Maintain Security* dan *Lombok Treaty*. Untuk menjelaskan fenomena kerjasama tersebut, digunakan pendekatan kerjasama pertahanan yang digagas oleh *Swedish Defense Commission* dan dilengkapi oleh Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno. Pada dasarnya, pendekatan tersebut menekankan bahwa hal terpenting yang menjadi kriteria untuk melakukan kerjasama pertahanan adalah dapat berkontribusi bagi keamanan sebuah negara atau memberikan nilai tambah yang dianggap tepat dengan biaya yang rendah, serta dapat meningkatkan kapabilitas operasional angkatan bersenjata negara yang bersangkutan, termasuk interoperabilitas dengan negara mitra.

Menariknya, kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia hanya berfokus pada kunjungan, pertemuan, dan latihan bersama, sehingga tidak sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas. Hal tersebut dikarenakan motif dari kerjasama antara kedua negara masih belum jelas, maka dari itu perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut.

ABSTRACT

Name : Ishna Indika
NPM : 2013330190
Title : *Defense Cooperation: A Case Study of Indonesia-Australia
Cooperation as Indonesia's Attempt to Overcome the
Limitations of its Military Capabilities*

States nowadays are required to have strong, powerful, and modern military capabilities. However, high cost trends make it increasingly difficult to maintain the traditional range of capabilities that a country's armed forces are required to have. By having and conducting defense cooperation between states, it is possible for states to train and educate their military forces with higher degree of quality. And this is what Indonesia did to overcome all the limitations of its military capabilities, by having defense cooperation with Australia.

This thesis use case study as the research method, which examines the defense cooperation between Indonesia and Australia within the framework of Agreement to Maintain Security and Lombok Treaty. To explain these phenomena, defense cooperation approach which initiated by the Swedish Defense Commission and completed by Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno was used. Basically, the approach emphasizes that the most important thing that became the criteria for having a defense cooperation is that it should add value to the state's security, can improve the operational capabilities of the state's armed forces, and also the interoperability with the state partners.

Nonetheless, the cooperation between Indonesia and Australia only focuses on meetings, visits, and trainings, so it does not correspond with the initial purpose to increase state's military capabilities. It is because the motive of the cooperation between those two countries is still unclear, and therefore needs to be examined further.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ucapan Terimakasih.....	ii
Abstrak.....	iii
<i>Abstract</i>	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Grafik.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Singkatan.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	4
1.2.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1 Kajian Literatur.....	6
1.4.2 Kerangka Pemikiran.....	9
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.5.1 Metode Penelitian.....	14
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.6 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II SUBSTANSI PERTAHANAN INDONESIA.....	17
2.1 Kebijakan Pertahanan Indonesia.....	17
2.2 Postur Pertahanan Indonesia.....	23
2.2.1 Postur TNI AD.....	25

2.2.2 Postur TNI AL.....	28
2.2.3 Postur TNI AU.....	32
2.2 Kapabilitas Militer Indonesia.....	36
2.2.1 Anggaran Pertahanan.....	37
2.2.2 Personil TNI.....	41
2.2.3 Alutsista.....	45
BAB III KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DAN AUSTRALIA SEBAGAI UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI KETERBATASAN KAPABILITAS MILITER.....	53
3.1 Konteks Kerjasama Pertahanan Indonesia-Australia.....	54
3.1.1 Geopolitik Indonesia dan Australia.....	54
3.1.2 Hubungan Indonesia dan Australia.....	58
3.1.3 Kondisi Eksternal yang Dihadapi oleh Indonesia (dan Australia).....	63
3.1.4 Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerjasama dengan Australia.....	65
3.2 Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Australia.....	70
3.2.1 <i>Agreement to Maintain Security</i>	72
3.2.2 <i>Lombok Treaty</i>	76
A. Pendidikan dan Pelatihan.....	79
B. Kunjungan dan Pertemuan.....	81
C. Latihan Bersama (Latma).....	84
D. Hibah.....	93
E. Operasi.....	94
BAB IV PENUTUP.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	100

Daftar Gambar

Gambar 2.1: Komponen Pertahanan Militer.....	20
Gambar 2.2: Peta Gelar TNI.....	25
Gambar 2.3: Anggaran Pertahanan Negara-Negara ASEAN 2007.....	40

Daftar Grafik

Grafik 2.1: Persentase Kesiapan Alutsista TNI AD.....	26
Grafik 2.2: Kebutuhan Minimum TNI AU dan Kondisi Riil.....	33
Grafik 2.3: Usulan dan Realisasi Anggaran Pertahanan TNI 2005-2011 (Dalam Triliun Rupiah).....	39
Grafik 2.4: Jumlah Personil TNI Tahun 2007.....	43
Grafik 3.1: Latihan Bersama Indonesia-Australia Sebelum Konflik Timor Timur.....	73

Daftar Tabel

Tabel 2.1 : Kondisi Ranpur TNI AL Tahun 2009 (Marinir).....	32
Tabel 2.2: Usia Pesawat Terbang TNI AU Tahun 2009.....	50
Tabel 2.3: Kondisi Teknis KRI Tahun 2009.....	51
Tabel 3.1: Rekapitulasi Ancaman terhadap Kedaulatan NKRI dalam 25 Tahun Mendatang.....	70

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADF	: <i>Australian Defense Forces</i>
ALA	: <i>Australian Language Adviser Indonesia</i>
Alutsista	: Alat Utama Sistem Pertahanan
AMS	: <i>Agreement to Maintain Security</i>
ANCORS	: <i>Australian Centre for Ocean Resources and Security</i>
ANZUS	: <i>Australia, New Zealand, and United States of America</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APC	: <i>Armored Personnel Carrier</i>
APEC	: <i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
ASAAP	: <i>Joint Aviation Safety and Airworthiness Project</i>
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
Brigif	: Brigadir Infanteri
CDSS	: <i>Centre of Defense and Strategic Studies</i>
Corpat	: <i>Coordinated Maritime Security Patrol</i>
CSIS	: <i>Center for Strategic and International Studies</i>
DACM	: <i>Dissimilar Air Combat Man</i>
DACT	: <i>Dissimilar Air Combat Tactics</i>
DBFM	: <i>Dissimilar Basic Fighter Maneuver</i>
Denma	: Detasemen Markas
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DITC	: <i>Defence International Training Centre</i>
EDD	: <i>Explosive Detection Dogs</i>
ePub	: <i>Electronic Publication System</i>
EW	: <i>Early Warning</i>
FFI	: <i>Free Fall Instructor</i>
FMP	: <i>Full Mission Profile</i>

FPC	: <i>Final Planning Conference</i>
GAR HAN	: Anggaran Pertahanan
GCI	: <i>Ground Control Interception</i>
Gultor	: Penganggulan Teorir
HADR	: <i>Humanitarian Assistance and Disaster Response</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HMAS	: <i>Her/His Majesty's Australian Ship</i>
IADSD	: <i>Indonesia-Australia Defense Strategic Dialogue</i>
IKAHAN	: Ikatan Alumni Pertahanan
INTERFET	: <i>International Force East Timor</i>
IPC	: <i>Initial Planning Conference</i>
IPMB	: <i>Intelligence Preparation and Monitoring of the Battlespace</i>
IRR	: <i>Incident Response Regiment</i>
JCSS	: <i>JAFFEE Center of Strategic Studies</i>
JOCCIT	: <i>Junior Officer Close Country Instructional Techniques</i>
JOCIT	: <i>Junior Officer Combat Instructional Training</i>
JSSC	: <i>Joint Service Staff College</i>
KAL	: Kapal Angkatan Laut
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kopassus	: Komando Pasukan Khusus
Kostrad	: Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
KRI	: Kapal Republik Indonesia
KSAL	: Kepala Staff Angkatan Laut
KSAU	: Kepala Staf Angkatan Udara
Latma	: Latihan Bersama
LBT	: <i>Light Battle Tank</i>
Linud	: Lintas Udara
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mabes	: Markas Besar

MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
MFF	: <i>Military Free Fall</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MSSP	: <i>Maritime Strategic Studies Program</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OMP	: Operasi Militer untuk Perang
OMSP	: Operasi Militer Selain Perang
PAL	: Penataran Angkatan Laut
Parako	: Para Komando
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMPP	: Pusat Pemeliharaan Perdamaian
PTS	: <i>Parachute Training School</i>
RAN	: <i>Royal Australian Navy</i>
Ranmor	: Kendaraan Motor
Ranpur	: Kendaraan Tempur
RMC-D	: <i>Royal Military College Duntroon</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSAF	: <i>Republic of Singapore Air Force</i>
SAR	: <i>Search and Rescue</i>
SARA	: Suku Ras Agama dan Antar Golongan
SAS	: <i>Special Air Service</i>
SASR	: <i>Special Air Service Regiment</i>
SESKOAL	: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut
SEWACO	: <i>Sensor Weapon and Command</i>
SkU	: Skuadron
SOCOMD	: <i>Special Operations Command Australia</i>
SOLAS	: <i>Safety of Life at Sea</i>
SPC-A	: <i>Sea Power Centre-Australia</i>

SPC-I	: <i>Sea Power Centre-Indonesia</i>
SR	: <i>Special Reconnaissance</i>
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
VWT	: <i>Vertical Wind Tunnel</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
WTSS	: <i>Weapons Training Simulation System</i>
Yonif	: Batalyon Infanteri
Yonkav	: Batalyon Kavaleri
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kondisi tidak perang, kemampuan pertahanan yang kuat dapat dijadikan sebagai simbol kedaulatan, kebanggaan, harga diri, serta menjadi sarana penggertak atau penggentar (*deterrent*) dalam dunia diplomasi. Tampaknya sudah merupakan hal yang dipahami secara umum bahwa jika pertahanan sebuah negara kuat, kedaulatan serta kekayaan nasional di darat, laut, maupun udara, tidak akan mudah diganggu-gugat oleh negara lain mana pun. Namun, sebaliknya jika pertahanan berada dalam keadaan lemah, maka berbagai kemungkinan dapat terjadi¹. Ancaman-ancaman baik dari dalam negeri seperti gerakan separatis dan konflik yang berbau SARA, maupun ancaman dari luar seperti terorisme, pembajakan, dan narkoba dapat dengan mudah masuk kedalam negara dan mengancam keamanan serta stabilitas negara. Selain itu, kekuatan militer juga dianggap sebagai suatu kebutuhan sebuah negara agar mendapat kesetaran dengan negara lain, tanpa adanya hegemoni yang mengancam kedaulatan, serta menjamin eksistensi mereka dalam berinteraksi dengan negara lain².

Apabila memperhatikan negara-negara besar di dunia yang disegani dalam dunia internasional, salah satunya adalah karena negara bersangkutan memiliki

¹ *Sistem Pertahanan & Manajemen Alustista Negara Republik Indonesia 2004-2009*, Komisi I DPR RI, (Jakarta: 2009), hlm 1-2

² Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations Theories and Approaches 4rd edition* (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 3

angkatan perang yang kuat dan besar. Sebagai contoh, Amerika Serikat menjadi negara besar dan disegani karena berhasil membangun armada perang yang ditakuti. Pembangunan armada kapal induk Amerika Serikat yang mampu menjelajah ke segala penjuru dunia sangat efektif mengontrol sistem pertahanan pada tiap negara di dunia. Inggris di masa lalu juga mempunyai ciri sistem pertahanan laut yang kuat dengan membangun Armada Angkatan Laut secara spektakuler pada zamannya, sehingga Inggris mempunyai banyak negara jajahan dimana-mana di seluruh dunia.³

Presiden Soekarno dalam pidatonya, pernah mengingatkan bangsa Indonesia untuk memiliki tentara yang kuat dengan mengutip pendapat filsuf China: *“Memiliki tentara yang kuat untuk mengangkat derajat wibawa bangsa”*. Selain Presiden Soekarno, Letjen T.B. Simatupang, juga mengatakan pernah mengatakan: *“Banyak angkatan perang yang hancur oleh karena para pemimpinnya hanya melihat ke belakang, melihat sejarah. Dan karena itu mereka lupa mempersiapkan angkatan perang untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.”*⁴

Kekuatan militer tersebut tentu bertujuan untuk mengamankan NKRI. Karena, melindungi segenap bangsa merupakan tujuan nasional Indonesia yang diwujudkan melalui pertahanan⁵. Instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan

³ Mayjen (Purn) H.S. Kirbiantoro dan Drs. Dody Rudianto, M.M., *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Badan Politik Pertahanan & Keamanan, Dewan Pimpinan Pusat, 2006), hlm. 5-7

⁴ Dikutip dari *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai*, oleh Simatupang, T.B. Letjen (Purn.), hlm. 77

⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara, Peraturan Presiden No. 7 (Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia, 2005), diakses dari

nasional tersebut, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dengan kekuatan militer, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang berdampak pada keutuhan dan kedaulatan negara menjadi tugas TNI, baik di darat, laut, maupun udara⁶.

1.2 Identifikasi Masalah

Namun pada kenyataannya, sektor pertahanan Indonesia sedang dihadapkan pada keadaan sulit mengingat minimnya kemampuan pertahanan nasional, diantaranya terkait dengan substansi ketersediaan dan kesiapan alat utama sistem senjata, serta kesejahteraan prajurit dan reformasi di tubuh TNI⁷. Minimnya anggaran pertahanan berakibat langsung pada lemahnya kinerja pertahanan seperti masalah perbatasan darat, pulau-pulau terdepan, *illegal fishing*, *illegal logging*, dan *illegal mining* yang terjadi setiap tahun dan merugikan negara triliunan rupiah. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan hal yang serius dan dapat merusak sistem pertahanan yang telah dibangun dalam waktu yang panjang apabila tidak segera dibenahi⁸.

<http://www.bappenas.go.id/files/8613/5229/8462/bab-7-peningkatan-kemampuan-pertahanan-negara.pdf> pada 2 Februari 2016

⁶ Drs. Agum Gunanjar Sudarsa, "Pertahanan dan Keamanan Negara", dalam *Mencari Format Komperhensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta: Propatria Institute Towards a Democratic Society, 2006), hlm. 190-191

⁷ Forum Group Discussion, *Masa Depan Lombok Treaty Bagi Hubungan Indonesia-Australia*, Biro Hubungan Internasional Deputi Seswapres Bidang Politik Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, Depok 21 Oktober 2008

⁸ *Sistem Pertahanan & Manajemen Alustista Negara Republik Indonesia 2004-2009*, Komisi I DPR RI, (Jakarta: 2009), hlm 1-2

Sejak memasuki zaman Orde Baru, pembangunan kekuatan tentara menjadi terabaikan. Alutsista yang digunakan masih banyak mengandalkan dari peninggalan pada zaman perang menghadapi Irian Barat (Papua). Banyak dari para petinggi militer “beralih profesi” menjadi penguasa politik dan enggan memikirkan pengembangan kekuatan angkatan perang. Orde Baru yang sering dikritik sarat dengan muatan militerisme namun sesungguhnya tidak ada pembangunan kekuatan militer yang signifikan. Bahkan, untuk memenangkan perang di Timor Timur, menurut penuturan Letjen Soetopo Juwono, mantan Gubernur Lemhanas, *supply* amunisi dipinjam dari Malaysia. Indonesia saat itu kesulitan persenjataan dan amunisi, masih kalah canggih dengan kualitas senjata yang digunakan Fretilin yang mendapatkan *supply* persenjataan dari banyak negara secara gelap (*black market*)⁹.

Kondisi alutsista pertahanan Indonesia yang memprihatinkan ini berlangsung hingga kini. Kesulitan anggaran pengadaan dan terbatasnya jumlah kapal perang yang memadai dengan tugas-tugas yang diembannya, sampai-sampai beberapa kapal milik Departemen Perhubungan dihibahkan kepada TNI AL yang diubah menjadi kapal perang guna menambah jajaran armada kapal perang TNI AL. Apabila infiltrasi dan invasi militer asing tiba-tiba datang dari luar, tentara kita hanya bisa bertahan dengan peralatan perang seadanya.¹⁰

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia dibawah *Agreement to Maintain Security* yang

⁹ Op.Cit., Mayjen (Purn) H.S. Kirbiantoro dan Drs. Dody Rudianto, M.M, hlm. 7

¹⁰ Ibid., hlm. 5-7

ditandatangani pada tahun 1995 dan *Lombok Treaty* pada 2006. Kerjasama pertahanan dibawah *Agreement to Maintain Security* berjalan singkat, karena adanya keterlibatan Australia dalam Konflik di Timor Timur. Indonesia kemudian memutuskan untuk tidak lagi terikat dengan perjanjian keamanan tersebut¹¹. Namun, kedua negara membentuk kembali kerangka kerjasama secara formal pada 2006, yaitu *Lombok Treaty*.

1.2.2 Perumusan Masalah

Setelah melakukan pertimbangan latar belakang, identifikasi masalah, dan diikuti oleh pembatasan masalah, maka rumusan penelitian yang menjadi acuan penulis adalah: “Bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi keterbatasan kapabilitas militernya?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang disusun oleh penulis bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai upaya negara yang bekerjasama untuk meningkatkan kapabilitas, dengan studi kasus Indonesia dan Australia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat anomali-anomali yang terjadi dalam kerjasama.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih bagi penulis terkait kondisi militer Indonesia serta bentuk dari kerjasama pertahanan Indonesia dengan Australia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

¹¹ Direktur Analisa Lingkungan Strategis, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, “Arah Kebijakan Hubungan Indonesia-Australia dibidang keamanan”, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri, 2006) hlm. 110

referensi bacaan bagi yang ingin meneliti lebih lanjut, khususnya mengenai kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia.

1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, penulis menghadirkan paparan singkat mengenai hubungan Indonesia dengan Australia khususnya di bidang politik pertahanan dan keamanan. Dale Stephens dan Stefan Gruber dalam jurnal *Harvard Asia Pacific Review*, Spring 2010 yang berjudul “*Cooperation, Friction and Safeguarding: Australia and Indonesia’s Security Relationship*”¹² memiliki pandangan bahwa tidak mungkin bagi Indonesia dan Australia untuk membuat keputusan strategis yang signifikan untuk negaranya masing-masing tanpa mempengaruhi kepentingan satu sama lain, karena kedua negara tersebut secara geografis terjalin dengan permanen. Indonesia dan Australia merupakan tetangga dekat dan hubungan baik kedua negara ini dianggap sebagai kepentingan strategis yang krusial.

Secara historis, hubungan antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut dan diwarnai oleh harmoni dan ketegangan, kerjasama dan kompetisi, komitmen dan konfrontasi dengan intensitas yang rendah. Dan pada tahun 1995, kedua negara menyetujui perjanjian keamanan yang disebut dengan *Agreement to Maintain Security* (AMS). Perjanjian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan keamanan bersama dan merancang konsultasi rutin ditingkat kementerian untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi pertahian

¹² Dale Stephens dan Stefan Gruber, “Cooperation, Friction and Safeguarding: Australia and Indonesia’s Security Relationship”, *Harvard Asia Pacific Review* Spring 2010, hlm.35

bersama. Namun, kerjasama ini dilupakan begitusaja ketika ada keterlibatan Australia dalam permasalahan domestik Indonesia, yaitu kasus Timor Timur. Pengalaman beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan diantara Indonesia dan Australia, namun kedua negara tersebut tetap berkomitmen untuk membangun hubungan keamanan yang tahan lama dengan satu sama lain.

Kajian Literatur selanjutnya merupakan pemikiran Beliveer Singh, dalam buku yang berjudul *Defense Relations Between Australia and Indonesia in the Post-Cold War Era*¹³, pada bab *Changing Australia-Indonesia Defense Relations and Their Impact on Bilateral and Regional Relations*. Beliveer Singh berpendapat bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Australia, khususnya dibidang pertahanan, membawa banyak keuntungan bagi Indonesia. Setelah perjanjian *Agreement to Maintain Security* ditandatangani, *image* Indonesia sebagai negara agresor sebagaimana merupakan dampak dari kebijakan konfrontatif Soekarno, telah hilang. Sebaliknya, Indonesia justru dianggap sebagai pemimpin di kawasan yang tertarik untuk memastikan kawasan tetap aman dan stabil, termasuk dalam membangun hubungan yang baik dengan Australia. Sebaliknya, saat hubungan antara Indonesia dengan Australia meregang, terutama terhadap latar belakang dari melemahnya Indonesia pasca era Soeharto, posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik juga melemah. Indonesia semakin lama-semakin terisolasi, *inward looking*, dan bahkan terlihat kehilangan kepengurusannya di ASEAN. Dengan meregangnya

¹³ Beliveer Singh, *Contributions in Military Studies: Defense Relations between Australia and Indonesia in the Post-Cold War Era*, (London: Greenwood Press, 2002), hlm. 125

Indonesia dengan Australia, Indonesia kehilangan bantuan teknis, politis, dan ekonomi. Karena, Australia selama ini telah menjadi negara yang paling kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan Indonesia, terutama mengenai masalah HAM.

Berbeda dengan dua pemikiran sebelumnya, Hugh White dalam Jurnal Far Eastern Economic Review 169.10 (Dec 2006) yang berjudul “*The Lombok Pact’s Empty Promise*”¹⁴ justru mengatakan bahwa negara yang memiliki kedekatan geografis, merupakan *seldom close friends*, tidak terkecuali untuk Indonesia dan Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Australia sudah dua kali mencoba untuk membangun hubungan yang kompleks namun sering kali bermasalah dalam perjanjian keamanan yang resmi. Yang pertama adalah *Agreement to Maintain Security* pada tahun 1995. Perjanjian tersebut hanya bertahan kurang dari empat tahun. Kemudian Indonesia dan Australia kembali mencoba membangun kerjasama dalam bidang yang serupa. Pada 2006, kedua negara menandatangani *Lombok Treaty*. Perjanjian tersebut kemungkinan akan berakhir dengan cara yang sama, yaitu dengan menaikkan harapan yang tidak realistis dan kemudian menyebabkan kekecewaan mendalam, membuat hubungan lebih merenggang, dan rentan terhadap masalah dan krisis.

Usaha baru antar kedua negara ini diyakini akan berakhir seperti perjanjian sebelumnya. Sebab, perjanjian keamanan ini tidak didasarkan pada kepercayaan dan kepentingan bersama, tetapi pada kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ditambah lagi, tidak mungkin bagi Australia untuk memenuhi sebagian atau seluruh

¹⁴ Hugh White, “The Lombok Pact’s Empty Promise”, dalam Jurnal Far Eastern Economic Review; Dec 2006; 169, 10; ProQuest, hlm.26

kewajiban dibawah traktat yang baru ini. Sangat jelas bahwa Indonesia berharap dari ditandatanganinya *Lombok Treaty*, pihak Australia setuju untuk tidak lagi memperbolehkan kelompok separatis Papua di Australia untuk berkampanye untuk kemerdekaannya. Mengingat *Lombok Treaty* merupakan inisiatif pihak Indonesia yang diajukan beberapa saat sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Australia pada April 2005, dan Presiden Yudhoyono pun terus mendorong agar perjanjian dibentuk setelah krisis dalam hubungan Indonesia dan Australia terjadi yang disebabkan oleh Australia menerima *refugee* kelompok separatis Papua. Jelas terlihat disini bahwa Indonesia memandang Australia sebagai ancaman bagi negara.

Sejalan dengan pemikiran Stephen & Gruber dan Beliveer Singh, penulis beranggapan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia memang dibutuhkan. Walaupun dalam pengimplementasiannya kerap mengalami kendala yang disebabkan oleh hubungan politik kedua negara, komitmen Indonesia dan Australia tetap terjaga, khususnya untuk menciptakan bagi keamanan masing-masing negara. Yang membedakan ketiga literatur tersebut dengan kajian penelitian penulis adalah, pembahasan mengenai kerjasama Indonesia dan Australia yang didasari oleh kepentingan Indonesia untuk mengatasi keterbatasan kapabilitas militernya.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Elemen-elemen utama dalam hubungan internasional menurut paradigma realisme adalah negara merupakan aktor yang dominan dan kepentingan nasional merupakan aspek utama yang harus dicapai oleh setiap negara untuk tetap dapat

eksis/*survive* dalam isu keamanan melalui instrumen militer. Realisme memandang bahwa setiap negara akan selalu berupaya untuk memaksimalkan *power*-nya dibandingkan negara lain, atau setidaknya dapat tercipta *balance of power*. Semakin besar keuntungan kekuatan militer, maka akan semakin besar jaminan keamanan yang dimiliki negara tersebut¹⁵.

Realisme menyatakan bahwa konsep keamanan nasional merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer, atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negaranya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternalnya. Satu-satunya instrumen untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya adalah dengan meningkatkan *military power* yang dimiliki negara bersangkutan. Dalam hal ini, kuantitas dan kualitas *level of arms* yang patut dimiliki aktor negara merupakan sebuah solusi rasional yang harus disediakan aktor negara¹⁶. Namun, terdapat konsekuensi penting yang muncul berkaitan dengan pengembangan kekuatan militer, yakni: beban anggaran militer yang besar dan semakin besarnya pengaruh militer dalam kehidupan politik domestik maupun internasional¹⁷.

Beberapa dekade yang lalu, perang modern ditandai dengan tingginya kapabilitas sebuah negara untuk merusak dan menghancurkan lawan. Satu-satunya negara yang memiliki kemampuan untuk melenyapkan banyak musuh dengan presisi yang tinggi dan resiko yang rendah, disaat biaya yang dikeluarkan tidak

¹⁵ Anak Agung Banyu Perwita, "Redefinisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neo-Realisme dalam Hubungan Internasional Kontemporer" dalam buku *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional AKtor, Isu, dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.26-27

¹⁶ Ibid., hlm 29-30

¹⁷ Ibid., hlm.32

membumbang tinggi adalah Amerika Serikat. Sedangkan bagi negara-negara lain, dibutuhkan interaksi antar negara untuk mencapai kemampuan tersebut. Dalam rangka mempertahankan negara dan mengembangkan sistem pertahanan yang relevan bagi perkembangan zaman, sebagian negara sepakat untuk melakukan perubahan struktural yang semula radikal dan tertutup menjadi lebih intensif dalam melakukan kerjasama militer dengan negara lainnya¹⁸.

Biaya yang tinggi membuat negara-negara kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas militernya¹⁹. Untuk mengatasi hal tersebut, negara membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya, sehingga memungkinkan untuk mendidik dan melatih kemampuan militer dengan kualitas yang tinggi²⁰. Berkaca pada negara-negara besar di Eropa yang berambisi untuk mengelola seluruh tugas-tugas pertahanannya sendiri, pada akhirnya mereka menemukan kesulitan untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas persenjataan yang dimilikinya²¹. Apabila melihat dari operasi yang dilakukan di Libya oleh negara-negara Eropa Barat, setelah seluruh kekuatan di negara tersebut digabungkan, tetap tidak ada jaminan negara-negara tersebut mencapai titik kapabilitas tertinggi yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis yang terjadi dalam operasi. Hal tersebut berlaku juga kepada negara kecil dan menengah. Tidak mungkin sebuah negara mampu mengembangkan secara independen

¹⁸ Thomas Bertelman, *International Defence Cooperation – Efficiency, Solidarity, Sovereignty*, (Stockholm: Government Office of Sweden, Ministry of Defence, 2014), hlm. 23

¹⁹ Ibid., hlm. 19

²⁰ Ibid., hlm. 23

²¹ Ibid., hlm. 24

kapasitas untuk menjaga teritori negaranya sendiri dalam melawan potensi ancaman dari negara yang jauh lebih kuat²².

Berdasarkan *Swedish Defence Commission*, hal terpenting yang menjadi kriteria untuk kerjasama adalah dapat berkontribusi bagi keamanan sebuah negara atau memberikan nilai tambah yang dianggap tepat dengan biaya yang rendah, serta dapat meningkatkan kapabilitas operasional angkatan bersenjata negara yang bersangkutan, termasuk interoperabilitas dengan negara mitra²³. Interoperabilitas dalam hal ini adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain seperti latihan bersama, yang mana merupakan hal yang krusial dalam kerjasama pertahanan²⁴. Disamping itu, menurut Hennis Plasschaert's, Menteri Pertahanan Belanda, kerjasama dapat meningkatkan dan mengisi kekurangan kapabilitas militer yang ada. Selain itu, perjanjian kerjasama yang ada harus digunakan secara maksimal dan diperkuat agar dapat terus berlanjut²⁵.

Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang menekankan kepada kepentingan nasional suatu negara. Karena itu, kerjasama ini bersifat sensitif dan menyangkut kedaulatan, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat negara yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerjasama pertahanan didefinisikan sebagai transaksi internasional yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk tujuan tertentu yaitu “kepentingan nasional” negara yang saling

²² Ibid.,

²³ Ibid., hlm. 59

²⁴ Ibid., hlm. 23

²⁵ “Defence Intensifies International Military Cooperation”, Ministry of Defence, diakses dari <https://www.defensie.nl/english/latest/news/2014/02/13/defence-intensifies-international-military-cooperation>, pada 3 September 2016

bekerjasama, dengan menggunakan sebuah traktat atau perjanjian tertulis yang formal²⁶.

Berawal dari kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara NORDIC, *Swedish Defense Commission* menjabarkan bahwa terdapat berbagai bentuk kerjasama militer yang memungkinkan untuk terjadinya rasionalisasi pengembangan kapabilitas militer sehingga memungkinkan untuk memperkecil pengeluaran namun pengembangan kapabilitas militer tetap berjalan dengan efektif. Kerjasama yang dilakukan dapat terbagi menjadi enam bentuk, yaitu kebijakan atau *policy area*, penyelarasan kapabilitas, perlengkapan dan peralatan, pendidikan personil, pelatihan, dan operasi²⁷. Kerjasama mengenai perlengkapan dan peralatan perang dapat dilakukan tanpa adanya *joint development*. Hal ini lebih mudah untuk berkolaborasi dengan diberlakukannya pembelian produk siap pakai, dan hal tersebut dapat memberikan keuntungan besar. Kerjasama dengan negara-negara lain pada pemeliharaan dan servis juga dapat mengurangi biaya²⁸. Seluruh kerjasama militer seperti pembelian peralatan, pelatihan, pendidikan dan peningkatan kapabilitas harus ditimbang terlebih dahulu apakah bersifat menguntungkan atau cenderung merugikan negara yang bersangkutan. Karena semakin terintegrasi negara-negara yang melakukan kerjasama, maka semakin mudah negara mengakses sumber daya militer negara lainnya²⁹.

²⁶ Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hlm.140

²⁷ Op.Cit., Thomas Bertelman, hlm. 17

²⁸ Op.Cit., “Defence Intensifies International Military Cooperation”, Ministry of Defence

²⁹ Op.Cit., Thomas Bertelman, hlm. 17

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama pertahanan dilakukan untuk mengisi keterbatasan kapabilitas militer sebuah negara dengan biaya yang rendah serta untuk mencapai kepentingan nasional. Hal penting lainnya dalam kerjasama pertahanan adalah dapat berkontribusi bagi keamanan negara yang bersangkutan.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian³⁰

Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut³¹: 1) penentuan topik, dalam hal ini, penulis memilih kasus mengenai kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas militer; 2) menentukan studi kasus, penulis memilih militer Indonesia untuk dijadikan unit analisa dalam penelitian dikarenakan adanya sebuah penyimpangan fenomena, yaitu dimana negara seharusnya memiliki militer yang kuat untuk menjaga keamanan wilayahnya, namun pada kenyataannya, sektor pertahanan Indonesia lemah. Studi kasus yang dikaji adalah kerjasama antara hubungan dua negara dengan kemampuan militer yang berbeda yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas, dalam hal ini adalah antara Indonesia dan Australia; 3) pemilihan teori untuk mengkonstruksi penjelasan mengenai kasus yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kerjasama

³⁰ Metode Penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Metode Penelitian menunjukkan prodesur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk dapat memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian, maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. (Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, 1991, hlm.122)

³¹ Robert K. Yin, *Case Study Research; Design and Methods 4th ed.*, (California: Sage Publication, Inc., 2009), hlm. 18

militer yang digagas oleh *Swedish Defence Commision*, dan dilengkapi oleh Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyanto; 4) pengumpulam data berdasarkan teori yang dipergunakan. Penulis mengumpulkan data mengenai keterbatasan kapabilitas militer Indonesia yang menjadi sumber permasalahan, dan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia dengan dibawah *Agreement to Maintain Security* dan *Lombok Treaty*; dan 5) menganalisa data-data yang telah dikumpulkan menggunakan teori.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian studi kasus, terdapat enam teknik pengumpulan data yang dapat diterapkan, yaitu melalui dokumen, *archival records*, wawancara, obervasi secara langsung, *participant-observation*, dan melalui artefak³². Namun, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini hanya melalui dokumen-dokumen yang berkaitan seperti buku, jurnal, dokumen resmi negara, dan laporan. Hal tersebut dikarenakan data yang berasal dari dokumen bersifat stabil, dengan kata lain mudah diakses berulang kali. Selain itu, sumber dokumen bersifat pasti, mengandung nama, referensi, dan penjelasan peristiwa secara detil. Data yang berasal dari dokumen juga memiliki rentang waktu yang panjang, banyak perisitwa, dan pengaturan³³.

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan

³² Ibid., hlm. 98

³³ Ibid., hlm 102

Dalam pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, yang didalamnya termasuk perumusan dan pembatasan masalah. Kemudian, penulis juga menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, memaparkan kerangka pemikiran yang membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, merumuskan metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta menjelaskan sistematika dari penelitian ini.

- **BAB II Substansi Pertahanan Indonesia**

Dalam bab ini dijabarkan data-data mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi militer Indonesia saat ini, kebijakan pertahanan, postur pertahanan Indonesia, serta kapabilitas militer Indonesia yang meliputi anggaran, personil, dan alutsista Indonesia.

- **BAB III Kerjasama Pertahanan Indonesia – Australia sebagai Upaya Indonesia dalam Mengatasi Keterbatasan Kapabilitas Militer**

Bab ini berisi data yang menjelaskan bentuk kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam bidang pertahanan dengan fokus *Agreement to Maintain Security* dan *Lombok Treaty*. Selain itu, geopolitik Indonesia dan Australia, ancaman yang dihadapi kedua negara, dan kepentingan nasional Indonesia menyangkut kerjasama dengan Australia dijelaskan dalam bab ini.

- **BAB IV Penutup**

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil serta jawaban dari penelitian.